KE UTUSAN BULATI (UTALLAR ANECAR). NOMOR 166/SK-up/HK/2010

TENTANG

PENETAPA 18 JK NEGERI 1 MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun dan untuk memperluas pelayanan pendidikan menengah serta meningkatkan daya tampung SMK di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu ditindak lanjuti dengan penetapan sebagaimana dimaksud :
- b. bahwa dengan mengacu pada Kepmendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Pasal 16 huruf e berbunyi Penetapan Pendirian Sekolah Negeri oleh Bupati/Walikaota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis Pendidikan yang menjadi kewenangannya:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan SMK Negeri 1 Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2010/2011.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;
- 5. Undang-Undang Repúblik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonésia Nomor 79 Tahun 2005;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007:
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008:
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2004;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2006;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2010.

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.